



Peran Hukum Bisnis Dalam Mendorong Inovasi Umkm Di Kota Medan

Lusni Silalahi

Universitas HKBP Nommensen Medan

Sannya Arta Sagala

Universitas HKBP Nommensen Medan

Hanna May Sinaga

Universitas HKBP Nommensen Medan

Toman Sony Tambunan

Universitas HKBP Nommensen Medan

Alamat: Jl. Sutomo No.4A 20235 Kota Medan Sumatera Utara

Korespondensi penulis:

lusni.silalahi@student.uhn.ac.id, hannasinaga@student.uhn.ac.id, sannya.sagala@student.uhn.ac.id,
toman.tbn@gmail.com

Abstrak. *Business law plays a crucial role in providing protection and support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the backbone of Medan's economy. This qualitative research examines the role of business law in fostering MSME innovation in Medan, addressing a gap in previous research regarding the direct relationship between legal regulations and the innovation process. A literature review found that business law, specifically business legality and the existence and protection of Intellectual Property Rights (IPR), significantly enhances MSME innovation and competitiveness. Despite constraints such as limited capital and infrastructure, business law has been shown to have a positive impact and support MSME creativity. Therefore, the research recommends strengthening competition oversight, facilitating access to financing and licensing, and improving infrastructure and entrepreneurship training to optimize the role of business law in the MSME innovation ecosystem.*

Keywords: *Business Law, Innovation, MSMEs, Medan City.*

Abstrak. Peran hukum bisnis sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian kota Medan. Penelitian kualitatif ini mengkaji peran hukum bisnis dalam mendorong inovasi UMKM di Kota Medan, mengatasi kesenjangan studi sebelumnya mengenai hubungan langsung antara regulasi hukum dan proses inovasi. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa hukum bisnis, khususnya legalitas usaha, kepatuhan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara signifikan meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan modal dan infrastruktur, hukum bisnis terbukti memberikan dampak positif dan mendukung kreativitas UMKM. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan persaingan usaha, kemudahan akses pembiayaan dan perizinan, serta peningkatan infrastruktur dan pelatihan kewirausahaan untuk mengoptimalkan peran hukum bisnis dalam ekosistem inovasi UMKM.

Kata Kunci: *Hukum Bisnis, Inovasi, UMKM, Kota Medan*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis yang tak terpisahkan dari struktur perekonomian Indonesia, memainkan peran fundamental dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM sangat signifikan,

Received Mei 28, 2025; Revised juni 31, 2025; Juli 04, 2025

* Lusni Silalahi, lusni.silalahi@student.uhn.ac.id

tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, tetapi juga dalam mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menyumbang 61.07% dari PDB nasional dan menyerap 97% angkatan kerja (Nasution et al., 2017). Di Kota Medan, peran UMKM juga sangat menonjol sebagai penggerak ekonomi lokal yang vital. Keberadaan UMKM di kota ini merupakan tulang punggung perekonomian yang harus terus didukung dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, inovasi telah menjadi imperatif bagi kelangsungan dan pertumbuhan UMKM. Inovasi tidak lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah strategi fundamental yang diandalkan khususnya oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan daya saing di pasar yang dinamis (Himawan et al., 2024). Aspek inovasi ini mencakup pengembangan produk baru, perbaikan proses produksi, hingga strategi pemasaran yang adaptif terhadap perubahan digital. Studi menunjukkan bahwa inovasi memediasi keberhasilan UMKM, baik melalui kompetensi kewirausahaan maupun lingkungan bisnis (Bancin & Julita, 2023). Khusus di Kota Medan, upaya peningkatan industri kreatif pada UMKM menjadi fokus utama revitalisasi ekonomi masyarakat lokal (Kasolati & Kamilah, 2024), dengan inovasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kearifan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan. Sebagai contoh, UMKM seperti Mumubutikue di Medan telah melakukan inovasi berkelanjutan pada rasa dan bentuk kue khas Melayu Medan, bahkan telah melakukan inovasi pada pemasarannya yang sudah go-digital (Noviah, Y.M., Marliyah, 2023). Kemampuan UMKM untuk berinovasi juga didorong oleh pertumbuhan industri halal yang signifikan, menuntut UMKM untuk terus berinovasi guna bersaing secara global (Rosa Da'mai, 2025).

Meskipun potensi inovasi UMKM sangat besar, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dari aspek legal. "Meskipun inovasi membawa manfaat signifikan, tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai regulasi hukum, khususnya perlindungan konsumen, inovasi ini bisa menjadi tantangan bagi keberlangsungan bisnis (Himawan et al., 2024). Oleh karena itu, hukum bisnis memegang peranan krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM untuk berinovasi dan berkembang. Penerapan hukum bisnis yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan (Salsabila et al., 2024). Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat memperoleh kepercayaan dari konsumen dan memiliki perlindungan hukum yang kuat (Rashed et al., 2025)

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk UMKM, termasuk di Kota Medan, masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait merek dagang. Hal ini mengakibatkan merek-merek tersebut berisiko tinggi "untuk disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain. Padahal, perlindungan hukum terhadap merek dagang telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pemilik merek. Permasalahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi dan pemahaman di tingkat pelaku UMKM.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran hukum bisnis dalam mendukung UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan

hukum bisnis yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kota Medan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan mendukung UMKM berdampak positif pada perkembangan ekonomi lokal, meskipun masih terdapat hambatan terkait edukasi hukum dan akses layanan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Aini, A., Tarihoran, A. W., & Fitrianto, B. (2025) yang berjudul *Perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk UMKM di Sumatera Utara* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) sangat penting bagi produk kreatif yang dihasilkan oleh UMKM di Sumatera Utara dan secara umum belum menelaah bagaimana hukum bisnis dapat mendorong inovasi secara langsung dalam UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Noviah, Y.M., Marliyah, 2023) menganalisis inovasi berkelanjutan UMKM Mumubutikue di Medan dari perspektif ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa mumubutikue melakukan inovasi pada produk, proses produksi, dan pemasaran digital, serta telah memperoleh sertifikasi halal yang menjadi nilai tambah usaha. Inovasi ini mendukung pertumbuhan UMKM sambil menjaga nilai lokal dan prinsip ekonomi Islam, meskipun ada tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal. Secara keseluruhan, inovasi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek syariah menjadi kunci keberhasilan usaha tersebut. Penelitian sebelumnya kurang menyoroti hubungan langsung antara regulasi hukum bisnis dengan proses inovasi yang dilakukan oleh UMKM di kota Medan. Selain itu, belum ada kajian yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek perlindungan hukum, kemudahan regulasi, dan hak kekayaan intelektual dengan dinamika inovasi produk dan layanan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam peran hukum bisnis sebagai pendorong inovasi UMKM di kota Medan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek hukum bisnis yang berpengaruh terhadap inovasi di kota Medan serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mendukung inovasi dan UMKM di kota Medan. Serta untuk mengkaji peran hukum bisnis dalam mendorong inovasi UMKM di kota Medan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi hukum bisnis memberikan perlindungan dan dukungan yang memfasilitasi kreativitas serta pengembangan produk baru oleh pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini akan menilai dampak peran hukum bisnis terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi UMKM di kota Medan secara menyeluruh. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum bisnis dan ekonomi lokal, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM dan inovasi di kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal dan publikasi yang telah ada sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik

untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema, serta dilakukan triangulasi sumber data untuk memastikan kredibilitas dan akurasi data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis *Literature Review*

Komponen	Judul Penelitian/Penulis/Tahun/Data Based	Metode Penelitian	Responden Dan Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
Jurnal 1	Peran Hukum Bisnis Terhadap Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kota Medan (Salsabila et al., 2024), Innovative: Journal Of Social Science Research	Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif	Pelaku UMKM di Kota Medan (jumlah tidak disebutkan secara eksplisit)	Hukum bisnis berperan penting dalam menunjang peningkatan ekonomi UMKM melalui aspek legalitas, perlindungan usaha, dan kepastian hukum yang mendorong keberlanjutan dan kepercayaan investor.
Jurnal 2	Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia (Delfira et al., 2025), Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen	Kuantitatif	50 responden pelaku UMKM di Indonesia	Permasalahan seperti modal, SDM, dan digitalisasi masih menjadi hambatan utama UMKM dalam berkontribusi terhadap perekonomian. Diperlukan regulasi dan dukungan hukum untuk mendorong pertumbuhan.
Jurnal 3	Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing (Noor et al., 2021), Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan	Studi literatur (kajian kualitatif)	Tidak disebutkan secara eksplisit (berbasis analisis hukum)	Penerapan hukum bisnis mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya saing UMKM, serta memberi perlindungan dalam aktivitas pemasaran dan ekspansi usaha.
Jurnal 4	Inovasi Bisnis UMKM dan Perlindungan Hukum: Menyelaraskan Kepentingan	Kualitatif normatif	Tidak disebutkan secara	Sinergi antara inovasi bisnis dan perlindungan

	Ekonomi dan Hukum (Himawan et al., 2024), <i>Ius Commercii</i> (Jurnal Hukum Dan Bisnis)		eksplisit (berbasis analisis hukum)	hukum diperlukan agar UMKM dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek legalitas, yang penting dalam menghadapi era digital dan kompetisi pasar.
Jurnal 5	Analisis Keberlanjutan UMKM di Tengah Tantangan Ekonomi Digital Kota Medan (Fauziah et al., 2025), <i>Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen</i>	Kuantitatif	75 UMKM di Kota Medan	UMKM menghadapi tantangan dalam teknologi digital dan pemasaran. Keberlanjutan dapat dicapai dengan strategi adaptif, literasi digital, serta dukungan hukum dan kebijakan dari pemerintah.

Tabel 2. Analisis *Literature Review*

Komponen	Judul buku /Penulis/Tahun terbit	Kutipan
Buku 1	Hukum Bisnis oleh Sobirin Malian (2018)	Buku ini menyediakan kerangka kerja fundamental hukum bisnis, mendefinisikan ruang lingkup dan tujuannya yang relevan bagi operasional UMKM, serta menekankan peran krusial Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Paten dan Hak Cipta dalam melindungi inovasi. Malian menunjukkan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya dan invensi UMKM melalui HKI memberikan insentif untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Selain itu, pembahasan tentang hukum kontrak memfasilitasi kemitraan dan ekspansi usaha, sementara aspek hukum persaingan dan perlindungan konsumen berkontribusi pada lingkungan pasar yang adil, secara tidak langsung mendorong UMKM untuk terus berinovasi demi daya saing (Malian, 2018).
Buku 2	Hukum Bisnis: Teori dan Praktek di Indonesia oleh Siti Marohatin (2014)	Buku ini membahas aplikasi praktis hukum bisnis di Indonesia, menyoroti pentingnya legalitas usaha dan bentuk-bentuk badan hukum bagi UMKM. Masrohatin menunjukkan bahwa pemahaman tentang perizinan bisnis seperti SIUP

		sangat vital karena legalitas yang jelas mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan dan menjalin kerja sama, yang keduanya merupakan pendorong utama bagi kemampuan UMKM untuk berinovasi dan berkembang. Meskipun tidak secara langsung membahas inovasi, buku ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap aspek-aspek hukum praktis menciptakan stabilitas operasional, yang merupakan prasyarat bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya ke arah inovasi (Masrohatin, 2014).
Buku 3	Pengembangan dan Manajemen UMKM oleh Syafrida Hafni Sahir, Danang Satrio, Abraham LP Lelengboto, Nina Mistriani, Dwi Susilo, Mohammad Sigit Taruna, Khaidarmansyah, Rika Adriyana, Deske W. Mandagi Janner Simarmata, Catharina Clara, Idah Kusuma Dewi (2024)	Di dalam buku ini terkhusus pada bab 11 secara spesifik berfokus pada aspek hukum dan regulasi yang relevan dengan UMKM, dengan penekanan pada fungsi dan sifat Hak Cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Clara menjelaskan bagaimana hak cipta memberikan hak eksklusif yang melindungi karya inovatif UMKM, seperti desain atau konten kreatif, sehingga mendorong mereka untuk berkreasi tanpa khawatir akan peniruan ilegal. Pembatasan perlindungan hak cipta juga dibahas, menunjukkan keseimbangan antara perlindungan inovasi dan kepentingan publik, yang secara keseluruhan mendukung ekosistem inovasi UMKM yang sehat dan dinamis (Sahir et al., 2024)

Penelitian mengenai peran hukum bisnis dalam mendorong inovasi dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan daya saing UMKM. Peningkatan kepatuhan hukum dan regulasi pelaku UMKM menunjukkan peningkatan dalam keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Kepatuhan ini mencakup aspek legalitas usaha, seperti perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap standar kualitas. Perlindungan hukum yang memadai memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM, sehingga mereka lebih berani untuk melakukan inovasi dan ekspansi usaha. Hukum bisnis sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan dalam praktik bisnis. Memahami teori dalam hukum bisnis akan membantu suatu perusahaan untuk beradaptasi secara efektif terhadap lingkungan sekitarnya serta mengarahkan suatu bisnis sesuai dengan konsep bisnis yang etis dan sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung aktivitas bisnis. Peran hukum bisnis dalam mendukung inovasi bisnis memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menjaga keberlanjutan dan integritas perusahaan di era yang didorong oleh teknologi dan informasi.

Peran Hukum Bisnis dalam Mendukung UMKM

Hukum bisnis memiliki peran strategis dalam memberikan dasar legalitas dan perlindungan kepada para pelaku UMKM. Aturan hukum yang jelas, sebagaimana diungkapkan (Salsabila et al., 2024) mampu menciptakan iklim usaha yang aman dan stabil. Hal ini mencakup aspek perizinan, kontrak kerja sama, perlindungan kekayaan intelektual (HKI), hingga kepastian dalam penyelesaian sengketa. Ketika UMKM merasa aman secara hukum, mereka akan lebih berani untuk berinovasi dan berkembang secara jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap HKI seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, memberikan insentif penting bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan.

Legalitas usaha yang diperoleh melalui kepatuhan hukum menjadi syarat utama untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah. Kepatuhan hukum juga membantu perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Pemahaman dan penerapan hukum bisnis sangat penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terutama di kota besar seperti Medan.

Regulasi persaingan usaha, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan di pasar dengan mencegah penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha yang dapat menghambat inovasi. Ketaatan terhadap hukum ini tidak hanya melindungi pelaku usaha tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk inovasi.

Tantangan yang Dihadapi UMKM dalam Konteks Ekonomi Modern

Berdasarkan penelitian (Delfira et al., 2025) dan (Noor et al., 2021), hambatan terbesar yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) atau kurangnya kreativitas, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi digital. Ini menghambat produktivitas dan kemampuan bersaing UMKM, terutama dalam pasar yang semakin kompetitif. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, yang menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan memperluas usaha.

Kurangnya adaptasi terhadap perkembangan zaman juga menjadi isu krusial. Dalam konteks digitalisasi, UMKM perlu melakukan transformasi baik dalam manajemen internal maupun strategi pemasaran. Tanpa dukungan pelatihan dan regulasi yang memadai, UMKM sulit berkembang dan cenderung tertinggal. Selain itu, (Fardani et al., 2024) menunjukkan bahwa infrastruktur yang kurang memadai, seperti aksesibilitas pasar dan fasilitas pendukung lainnya, dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan inovasi.

Tingginya tingkat persaingan antar pelaku usaha di Kota Medan menjadi tantangan. Banyak UMKM menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk besar atau dengan harga yang lebih rendah. Rendahnya tingkat kepemilikan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat juga berdampak pada kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan melakukan inovasi.

Sinergi antara Inovasi Bisnis dan Perlindungan Hukum

Di dalam (Himawan et al., 2024) menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum dalam pengembangan UMKM. Di era digital, inovasi adalah kunci agar UMKM mampu bersaing, baik dalam produk maupun pelayanan. Namun, inovasi juga harus diikuti oleh jaminan perlindungan hukum, terutama terkait hak cipta, merek dagang, dan transaksi digital agar usaha tetap aman secara hukum. Ketika UMKM berinovasi tanpa perlindungan hukum, risiko pelanggaran dan penyalahgunaan data atau produk menjadi tinggi. Oleh sebab itu, sinergi antara inovasi dan hukum memberikan kepastian dan kepercayaan bagi konsumen maupun mitra usaha. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun UMKM yang tahan terhadap perubahan zaman dan mampu bersaing secara global. Penerapan hukum bisnis yang baik sangat penting bagi pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan aman dan teratur, membantu mengurangi risiko sengketa dan penipuan.

Peran Strategi Adaptif dalam Keberlanjutan UMKM

Di dalam penelitian (Fauziah et al., 2025) menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM di tengah tantangan ekonomi digital sangat bergantung pada kemampuan adaptasi. Strategi adaptif mengacu pada kesiapan UMKM untuk menyesuaikan model bisnis, pola pemasaran, hingga penggunaan teknologi. Tanpa adaptasi ini, UMKM akan kesulitan dalam menghadapi tantangan

seperti perubahan perilaku konsumen, meningkatnya kompetitor digital, serta kebijakan ekonomi yang dinamis. Strategi adaptif juga mencakup peningkatan literasi digital pelaku UMKM dan penguatan ekosistem digital yang mendukung. Pemerintah dan lembaga terkait perlu hadir dengan program pendampingan dan pelatihan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dalam era transformasi digital yang cepat ini.

Implikasi Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Semua jurnal yang ditinjau secara tidak langsung menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendukung UMKM. Baik dalam bentuk regulasi hukum, insentif finansial, maupun program pemberdayaan, peran pemerintah sangat menentukan kelangsungan usaha mikro dan kecil. Penelitian (Sitompul et al., 2023) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, terutama di bidang fiskal dan moneter seperti Kredit Usaha Rakyat dan dukungan perpajakan, sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Terlebih lagi, dalam konteks digitalisasi dan hukum bisnis, regulasi harus dibuat lebih sederhana, mudah diakses, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.

Selain regulasi, kebijakan yang mendorong kolaborasi antara sektor swasta, pendidikan, dan pelaku UMKM akan mempercepat proses modernisasi UMKM. Pendekatan ini akan menghasilkan ekosistem bisnis yang sehat dan inklusif, di mana UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan hukum bisnis yang kuat dan implementasinya yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di kota Medan, serta UMKM memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum bisnis dalam meningkatkan inovasi UMKM di kota Medan telah diterapkan dan dilakukan dengan baik serta memberikan dampak positif dan mendukung bagi para pelaku UMKM di kota Medan. Aspek hukum bisnis seperti regulasi persaingan usaha, perlindungan hukum bagi UMKM, dan kepatuhan terhadap standar hukum sangat berpengaruh pada inovasi UMKM di kota Medan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan ketat, keterbatasan modal, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya jiwa kewirausahaan, yang menghambat penerapan hukum bisnis dalam mendukung inovasi UMKM selain itu hukum bisnis juga berperan penting dalam mengatur aktivitas bisnis dan interaksi antara individu serta entitas bisnis lainnya. Sebagai rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu memperkuat pengawasan persaingan usaha, mempermudah akses pembiayaan dan perizinan UMKM, meningkatkan infrastruktur, serta mengembangkan program pelatihan kewirausahaan. Selain itu, revisi regulasi persaingan usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM di kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bancin, A., & Julita, J. (2023). Innovation the Success of Micro, Small, and Medium Enterprises in Medan City. *Journal of International Conference ...*, 6(3), 449–461. <https://www.ejournal.aibpmjournals.com/index.php/JICP/article/view/2805%0Ahttps://www.ejournal.aibpmjournals.com/index.php/JICP/article/download/2805/2274>
- Delfira, A. F., Yuliarman, P., Baihaqi, M., & Harahap, L. M. (2025). Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia.

- Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 167–180.
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3184>
- Fardani, A., Fajri, F. N., Muhsoni, R., Hidayat, F. R., & Nugraha, Y. A. (2024). The Impact of UMKM Growth and Road Infrastructure on Economic Growing Impact in the Village of Korang Mukti. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis Digital*, 1(01), 24–36.
- Fauziah, Z. Z., Rahmawati, C., Nayla Salsabila, Raysha Zahra Rigandi, & Tamara Icha Nadine Saragi Turnip. (2025). Analisis Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Tengah Tantangan Ekonomi Digital Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 181–189.
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3182>
- Himawan, D., Dava, R., Ferdinand, S., Setia, I. A., & Derdya, M. I. (2024). Inovasi Bisnis UMKM dan Perlindungan Hukum : Menyelaraskan Kepentingan Ekonomi dan Hukum. *Ius Commercii: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 1(1), 10–16.
- Kasolati, & Kamilah. (2024). Data Collection on MSME Creative Industries in Medan City According to a Sharia Accounting Perspective. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 189–196. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2477>
- Malian, S. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis* (Cet.2). Kreasi Total Media.
- Masrohatin, S. (2014). *Hukum Bisnis: Teori dan Praktek di Indonesia* (Z. Anshori (ed.); Cet.1). STAIN Jember Press.
- Nasution, M. Y. F. H., Pintor Nasution, M., & Gultom, P. (2017). Confirmatory Factor Analysis On The Legal Aspects Of Business Funding With Securities Crrowdfunding Scheme On SMEs In Medan City. *Morfai Journal*, 1, 541–552.
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>
- Noviah, Y.M., Marliyah, dan D. R. H. (2023). Analisis Inovasi Berkelanjutan UMKM Mumubutikue Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 121.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5055%0Ahttps://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/5055/3316>
- Rashed, A., Ramadhan, M. R. A., & Kristanto, Y. (2025). Peran Hukum Bisnis dalam Mendorong Kewirausahaan Bisnis UMKM. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4500–4506. <https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/albasirah/article/view/351>
- Rosa Da'mai. (2025). Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 44–54. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1697>
- Sahir, S. H., Abraham, D. S., Lelengboto, L., Mistriani, N., Susilo, D., Taruna, M. S., Khaidarmansyah, Adriyana, R., Mandagi, D. W., Simarmata, J., Clara, C., & Dewi, I. K. (2024). *Pengembangan dan Manajemen UMKM* (A. K. Karim (ed.); Cet.1). Abdul Karim.
- Salsabila, A. P., Tanjung, H. Y., Hsb, M. A. R., Saragih, M. A., Rahayu, P., Lubis, R. J., Fitriani, R., Maulana, R., Tanjung, R. R., & Hasanah, U. (2024). Peran Hukum Bisnis Terhadap Pelaku Umkm Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11431–11440.
- Sitompul, M. D. P., Lubis, S. N., & Rahmanta. (2023). The Effect of Government Policies

- on the Success of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Regional Development in North Tapanuli Regency. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 20(4), 225–236. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2023/v20i4754>
- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan Wilson R.G. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta: Prenamedia Group.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Manajemen. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony.(2023). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.